

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan pilar utama dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan kebijakan Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) sejak tahun 2020 sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional dalam kerangka Merdeka Belajar. Program ini diatur melalui Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak yang kemudian diperbarui melalui Permendikbudristek Nomor 52 Tahun 2023 dan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2024. Regulasi tersebut menegaskan bahwa PPGP bertujuan melahirkan profil Guru Penggerak, yaitu guru yang: (1) mampu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan merefleksikan pembelajaran berbasis kebutuhan murid; (2) berkolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, kepala sekolah, dan komunitas; (3) mengembangkan kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan; (4) menumbuhkembangkan ekosistem pembelajar melalui olah rasa, karsa, raga, dan pikir; serta (5) memimpin dan mendampingi warga satuan pendidikan dalam mengelola program sekolah.

Target implementasi PPGP sangat ambisius. Berdasarkan Perdirjen GTK Nomor 4980/B/HK/04.01/2022 tentang Juknis Pelaksanaan PPGP, program ini dirancang untuk mencetak lebih dari 400.000 guru penggerak pada 2020–2024. Di Provinsi Bali, hingga Desember 2024 telah terdapat 3.227 guru penggerak dari 11 angkatan pada program reguler, yang tersebar di 9 kabupaten/kota. Sebagian besar telah menduduki jabatan strategis sebagai kepala sekolah maupun pengawas sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa PPGP merupakan program prioritas strategis yang memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pendidikan di daerah.

Meskipun demikian, hasil monitoring dan evaluasi (monev) oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Bali terhadap 1.214 kegiatan pendampingan individu (angkatan 4–11) menemukan berbagai tantangan di lapangan. Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan program cukup baik dengan rata-rata nilai pemantauan kinerja pengajar praktik sebesar 3,70 dari skala 4 dan pemantauan ketercapaian belajar pendampingan individu sebesar 3,69 dari skala 4. Instrumen monev juga mencatat aspek temuan praktik baik dan hambatan. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa tantangan utama yang dihadapi calon guru penggerak dalam mengikuti program dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Tantangan Penerapan PPGP Berdasarkan Hasil Monev BGP Provinsi Bali

Kategori Tantangan	Temuan di Lapangan
Manajemen waktu dan beban kerja	Sulit mengatur waktu antara tugas mengajar, peran keluarga, kegiatan adat Bali, serta proyek CGP.
Dukungan sekolah dan lingkungan	Dukungan kepala sekolah dan rekan guru belum merata; ada penolakan terhadap program baru.
Keterampilan pedagogik	Kesulitan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, refleksi, dan strategi inovatif.
Penguasaan teknologi	Belum terbiasa menggunakan LMS, <i>Canva</i> , <i>Google Site</i> ; terkendala jaringan saat daring.
Kolaborasi dengan aktor pendukung	Belum akrab dengan fasilitator maupun pengajar praktik; koordinasi belum optimal.
Sarana dan prasarana	Kebutuhan ATK saat lokakarya tidak sesuai; fasilitas sekolah kurang mendukung.
Tekanan eksternal dan psikologis	CGP merasa cemas, terbebani sebagai motor penggerak, serta menghadapi tekanan sosial

Jika dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan regulasi, maka terlihat adanya gap antara kebijakan dan implementasi di lapangan sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Perbandingan Kondisi Ideal dan Realita terkait PPGP di Provinsi Bali

Aspek	Kondisi Ideal (Harapan)	Realita (Temuan Monev di Provinsi Bali)	Sumber Kebijakan
Kepemimpinan Pembelajaran	Guru Penggerak mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan penggerak komunitas belajar.	Tidak semua CGP mendapat dukungan penuh; resistensi dari rekan sejawat masih terjadi.	Permendikbudristek No. 26 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (2); Panduan Umum PGP 2023
Manajemen Waktu	CGP mampu menyeimbangkan tugas mengajar, keluarga, adat, dan program penggerak.	Banyak CGP kesulitan membagi waktu karena peran	Juknis Pelaksanaan PGP 2023 Bab III

Aspek	Kondisi Ideal (Harapan)	Realita (Temuan Monev di Provinsi Bali)	Sumber Kebijakan
		ganda dan tuntutan adat.	
Inovasi Pedagogik	CGP dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak pada kebutuhan murid.	Sebagian CGP kesulitan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.	Permendikbudristek No. 26 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (3); Modul PGP 1.1 & 1.2 Tahun 2023
Penguasaan Teknologi	CGP terbiasa menggunakan LMS, <i>Canva</i> , <i>Google Site</i> , dan platform digital pembelajaran lainnya.	Banyak CGP belum mahir menggunakan aplikasi digital dan terkendala jaringan.	Juknis Pelaksanaan PGP 2023; Modul PGP “Pemanfaatan Teknologi” Tahun 2023
Kolaborasi dan Pendampingan	CGP berkolaborasi erat dengan fasilitator dan pengajar praktik dalam pelaksanaan lokakarya dan aksi nyata.	Relasi belum akrab; koordinasi belum optimal.	Permendikbudristek No. 26 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (2) huruf c; Panduan Umum PGP 2023
Fasilitas Pendukung	Sarana dan prasarana sekolah serta lokakarya mendukung penuh praktik PPGP.	Ketersediaan ATK dan fasilitas sekolah belum memadai.	Panduan Pelaksanaan Lokakarya PGP 2023; Permendikbudristek No. 52 Tahun 2023
Kondisi Psikologis dan Sosial	CGP percaya diri, termotivasi, dan didukung oleh komunitas sekolah.	CGP merasa terbebani, cemas, dan mendapat tekanan sosial dari lingkungan sekitar.	Modul 3.1 PGP “Kesejahteraan Psikologis Guru” Tahun 2023; Permendikbudristek No. 26 Tahun 2022

Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap antara kondisi ideal dan realita. Secara ideal, guru penggerak diharapkan mampu menjadi pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas guru, serta pencetus budaya positif di sekolah. Namun kenyataannya, implementasi PPGP di Bali masih menghadapi kendala. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa evaluasi PPGP menjadi sangat penting. Evaluasi program tidak hanya berfokus pada hasil akhir (*outcome*), tetapi juga perlu menelaah kesesuaian konteks kebijakan, kesiapan sumber daya, kualitas proses implementasi, serta ketercapaian hasil program secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam.

Penelitian terdahulu mendukung urgensi pentingnya evaluasi program guru penggerak. Misalnya evaluasi program di Kabupaten Kubu Raya menemukan program guru

penggerak meningkatkan kualitas guru, namun evaluasi terbatas pada jenjang SMA (Nurhasanah et al., 2022). Selain itu penelitian oleh Risdiyanto et al., 2024 di Kota Bandar Lampung menilai program berhasil meningkatkan kompetensi guru, tetapi masih menghadapi masalah pada aspek input. Penelitian PPGP di Bekasi juga menggunakan model CIPP dan menemukan program relevan, namun pengelolaan sumber daya masih lemah (Yeni et al., 2023). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk evaluasi yang lebih luas, khususnya di tingkat provinsi.

Meskipun Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) secara nasional telah selesai dilaksanakan pada tahun 2024, evaluasi terhadap program tetap penting dilakukan. Hal ini disebabkan karena PPGP merupakan program strategis nasional yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas guru, kepemimpinan pembelajaran, budaya sekolah, serta peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, banyak lulusan program yang saat ini telah menempati posisi strategis sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun penggerak komunitas belajar di daerahnya. Oleh karena itu, evaluasi pasca implementasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program telah berjalan sesuai tujuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan program peningkatan kompetensi guru di masa mendatang.

Secara ideal, evaluasi dampak program pendidikan seperti PPGP dilakukan menggunakan pendekatan longitudinal agar perkembangan kompetensi peserta dan dampak program dapat diamati secara berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu. Pendekatan longitudinal memungkinkan evaluator melihat perubahan perilaku, kepemimpinan pembelajaran, maupun budaya sekolah sebelum, selama, dan setelah program dilaksanakan. Namun demikian, penelitian longitudinal membutuhkan waktu, biaya, dan proses pengumpulan data berulang yang cukup panjang sehingga kurang memungkinkan dilakukan dalam keterbatasan penelitian tesis.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Model CIPP memungkinkan evaluasi dilakukan secara komprehensif terhadap konteks program, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, hingga hasil program melalui pengumpulan data pada satu periode waktu (*cross-sectional*). Dengan pendekatan tersebut, penelitian tetap mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas pelaksanaan PPGP di Provinsi Bali meskipun pengumpulan data dilakukan satu kali.

Dengan demikian, evaluasi PPGP di Provinsi Bali menggunakan model CIPP menjadi sangat relevan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas implementasi program serupa kedepannya.

1.2 Deskripsi Program

PPGP merupakan salah satu kebijakan strategis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam rangka mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Program ini merupakan episode ke-5 dalam rangkaian kebijakan Merdeka Belajar dan resmi diluncurkan pada hari Jumat, 3 Juli 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui siaran daring yang diikuti oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan, organisasi profesi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta para insan pendidikan di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa "Guru Penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan Indonesia, diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga menjadi Pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan."

Arah program Guru Penggerak berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui *on-the-job coaching*, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah menyeluruh. Pelatihan kepemimpinan sekolah baru diawali dengan rekrutmen calon Guru Penggerak. Direktur Jenderal GTK, Iwan Syahril, menjelaskan proses pendidikan dan penilaian Guru Penggerak berbasis dampak dan bukti. “Proses kepemimpinan sangat penting dan dalam proses pengembangan kepemimpinan ini, kami berkaca dari berbagai macam studi dan pendekatan andragogi atau pembelajaran orang dewasa bahwa kita harus lebih fokus kepada *on the job learning*. Artinya, pembelajaran yang relevan dan kontekstual sehingga memberi dampak sebaik-baiknya,” imbuh Iwan.

Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Terdapat tiga paket modul pelatihan. Paket Pertama adalah Paradigma dan Visi Guru Penggerak dengan materi refleksi filosofi pendidikan Indonesia – Ki Hadjar Dewantara, nilai-nilai dan visi Guru Penggerak, dan membangun budaya positif di Sekolah. Paket Kedua adalah Praktik Pembelajaran yang Berpihak pada Murid dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan pelatihan (*coaching*). Paket Ketiga adalah Kepemimpinan Pembelajaran yang dalam Pengembangan Sekolah berisi materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid.

Program guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak harus lulus seleksi dan mengikuti PPGP. Program ini akan menciptakan guru penggerak yang dapat: (a) Mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi,

dan kolaborasi secara mandiri, (b) Memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik, (c) Merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua, (d) Berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid, (e) Mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah

Guru penggerak diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya dengan cara: (a) Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya, (b) Menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, (c) Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, (d) Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, (e) Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong *well-being* ekosistem pendidikan sekolah.

Guru penggerak merupakan guru-guru terpilih dari seluruh penjuru Indonesia yang telah lulus dari PPGP. Pada pelaksanaan pendidikan, guru penggerak akan mempelajari 3 paket modul dan dibersamai oleh Fasilitator, Pengajar Praktik, maupun Instruktur. Pembelajaran berlangsung selama 6 bulan dan 310 jam pelajaran baik secara daring maupun luring. Penilaian kelulusan calon guru penggerak dilakukan oleh fasilitator dan pengajar praktik yang mendampingi.

Hingga Desember 2024, PPGP telah dilaksanakan selama 11 angkatan di Provinsi Bali serta menghasilkan 3.227 guru penggerak yang tersebar di 9 kabupaten/kota. Banyak dari lulusan program ini telah dipercaya untuk menempati jabatan strategis sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak. Pasal 13 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa sertifikat Guru Penggerak digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi kepala

sekolah, pengawas sekolah, maupun penugasan strategis lain di bidang pendidikan. Dengan struktur dan tujuan tersebut, PPGP diharapkan dapat membentuk ekosistem pendidikan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan transformatif dengan berfokus pada kebutuhan dan perkembangan murid sebagai pusat pembelajaran.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, pembatasan masalah diperlukan untuk memastikan fokus kajian yang jelas dan mendalam. Penelitian ini membahas evaluasi PPGP secara regular (bukan rekognisi). Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang akan dibatasi pada aspek-aspek berikut:

1. Aspek Konteks (*Context*): Penelitian ini akan dibatasi pada kesesuaian program dengan pemenuhan pemimpin pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, pemerataan pelatihan terhadap guru dan relevansi program dengan kebijakan nasional.
2. Aspek Input (*Input*): Penelitian ini akan dibatasi pada pembahasan pada sumber daya yang mendukung implementasi PPGP termasuk kualitas modul pelatihan, kualitas dan ketersediaan aktor pendukung (fasilitator dan pengajar praktik), evaluasi aktor pendukung, dan infrastruktur pendukung pembelajaran.
3. Aspek Proses (*Process*): Penelitian ini akan dibatasi pada pelaksanaan pendidikan secara daring dan luring, hambatan selama pendidikan dan partisipasi calon guru penggerak dari awal hingga akhir program.
4. Aspek Produk (*Product*): Penelitian ini akan dibatasi pada pembahasan terkait produk dari PPGP termasuk peningkatan keterampilan pedagogik dan kepemimpinan pembelajaran, peningkatan kualitas siswa, perubahan perilaku dan praktik pembelajaran serta pengembangan budaya sekolah oleh guru penggerak yang telah mengikuti pendidikan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, deskripsi program dan pembatasan masalah, berikut dijabarkan rumusan masalah dalam evaluasi ini

1. Bagaimana kualitas PPGP di Provinsi Bali ditinjau dari aspek *context*?
2. Bagaimana kualitas PPGP di Provinsi Bali ditinjau dari aspek *input*?
3. Bagaimana kualitas PPGP di Provinsi Bali ditinjau dari aspek *process*?
4. Bagaimana kualitas PPGP di Provinsi Bali ditinjau dari aspek *product*?
5. Apa saja kendala yang dihadapi peserta dan aktor pendukung PPGP dalam mengikuti pendidikan?
6. Apa harapan peserta dan aktor pendukung PPGP terkait program peningkatan kompetensi guru kedepannya?

1.5 Tujuan Evaluasi

Adapun tujuan dari evaluasi model CIPP terhadap PPGP di Provinsi Bali sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan PPGP di Provinsi Bali ditinjau dari aspek *context*.
2. Mendeskripsikan PPGP di Provinsi Bali ditinjau dari aspek *input*.
3. Mendeskripsikan PPGP di Provinsi Bali ditinjau dari aspek *process*.
4. Mendeskripsikan PPGP di Provinsi Bali ditinjau dari aspek *product*.
5. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi peserta dan aktor pendukung PPGP dalam mengikuti pendidikan
6. Merangkum harapan peserta dan aktor pendukung PPGP terkait program peningkatan kompetensi guru kedepannya



1.6 Manfaat Evaluasi

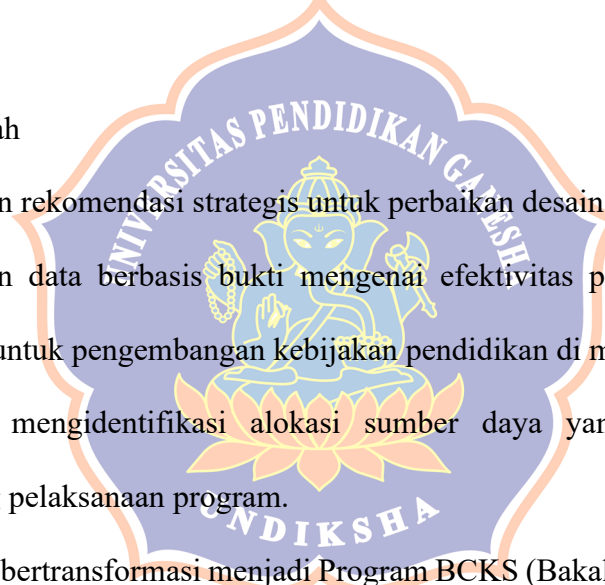
Pada bagian ini akan dijelaskan terkait manfaat dilakukannya penelitian secara teoretis dan praktis baik bagi pemerintah, guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, siswa maupun bagi peneliti lain atau akademisi.

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan model evaluasi PPGP berbasis CIPP. Penelitian ini diharapkan menyediakan rekomendasi strategis untuk perbaikan pelaksanaan PPGP di Provinsi Bali maupun program peningkatan kompetensi guru yang serupa kedepannya

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

- 
- a) Memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan desain dan pelaksanaan PPGP.
 - b) Memberikan data berbasis bukti mengenai efektivitas program, sehingga dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan pendidikan di masa depan.
 - c) Membantu mengidentifikasi alokasi sumber daya yang lebih efisien untuk mendukung pelaksanaan program.
 - d) PPGP telah bertransformasi menjadi Program BCKS (Bakal Calon Kepala Sekolah).

Namun, hasil penelitian ini tetap relevan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan, desain pelatihan, serta pembinaan kepemimpinan pendidikan pada program sejenis di masa mendatang.

2. Bagi Guru

- a) Memberikan masukan terkait relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan nyata guru di lapangan.
- b) Meningkatkan kualitas pengalaman pelatihan melalui rekomendasi perbaikan pada aspek proses dan implementasi.

- c) Membantu guru yang belum mengikuti PPGP memahami dampak program terhadap pengembangan kompetensi mereka, baik dalam pembelajaran maupun kepemimpinan.

3. Bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

- a) Memberikan panduan untuk mendukung guru penggerak dalam mengimplementasikan hasil pelatihan di sekolah.
- b) Memperjelas peran kepala sekolah dan pengawas dalam mendukung keberhasilan program, termasuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi guru penggerak.
- c) Membantu dalam monitoring dan evaluasi dampak program terhadap kinerja guru dan sekolah.

4. Bagi Siswa

- a) Secara tidak langsung meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas melalui perbaikan praktik dan metode yang diterapkan oleh guru penggerak.
- b) Memberikan pengalaman belajar yang lebih inspiratif dan mendukung pengembangan potensi siswa secara holistik.
- c) Menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan siswa.

5. Bagi Peneliti Lain atau Akademisi

- a) Memberikan referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang evaluasi program pendidikan berbasis model CIPP atau evaluasi kebijakan pendidikan lainnya.
- b) Menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori evaluasi program pendidikan.
- c) Memperkaya literatur tentang efektivitas PPGP di Indonesia.